



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 02 September 2015.
Pukul	: 14.25 – 18.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.M. Ridwan Hisjam/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan Realisasi APBN 2015; 2. Lain-lain.
Hadir	: 39 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.M. Ridwan Hisjam., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. REALISASI PELAKSANAAN APBN 2015.

Komisi X DPR RI memahami daya serap anggaran Kemendikbud RI per tanggal 31 Agustus 2015 sebesar 44% karena adanya permasalahan diantaranya restrukturisasi Kementerian/Lembaga dalam kabinet kerja. Untuk selanjutnya, Mendikbud RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendikbud RI pada akhir Desember 2015 di ditargetkan mencapai di atas 93%.

B. LAIN-LAIN.

1. Program Indonesia Pintar (PIP).

- a. Dalam rangka pengawasan, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data realisasi penyaluran KIP per 31 Agustus 2015 sebanyak 9.482.174 siswa per kab/kota, nama penerima, dan nama sekolah. Data yang dimaksud agar disampaikan paling lambat saat RDP Panja PIP Komisi X DPR RI yang dijadwalkan pada akhir September 2015.
- b. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar melakukan koordinasi yang lebih baik dengan K/L lainnya dan bank penyalur dalam pendataan penerima PIP dan penyaluran dana PIP.
- c. Mengingat masih banyaknya masyarakat, kepala dinas, dan para guru yang belum memahami PIP, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi PIP .

2. Guru dan Tunjangan Guru.

- a. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengkaji kebijakan terhadap guru diantaranya tentang kompetensi, kualifikasi, pelaksanaan dan evaluasi sertifikasi, distribusi dan pengaturan, serta kesejahteraan guru.
- b. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mensinkronisasi data yang ada di kab/kota dengan data di Kemendikbud RI, mengingat Komisi X DPR RI masih sering menemukan data yang tidak sinkron ketika melakukan pengawasan di lapangan.
- c. Dalam rangkaantisipasi akan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi sebagaimana turunan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendikbud RI perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis.
- d. Kemendikbud RI perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Indonesia (LPTKI) tentang peningkatan kualitas guru.

3. Kebudayaan.

Komisi X DPR RI menilai bahwa revolusi mental belum tergambar secara optimal di program kerja Kemendikbud RI, untuk itu Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan program-program kebudayaan agar apa yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam RPJMN dapat terwujud.

4. Bansos selain PIP.

- a. Mengingat realisasi penyaluran kegiatan bansos selain PIP banyak sekali yang masih di bawah 50%, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menjamin bahwa program penyaluran bansos selain PIP tersebut terealisasi sampai akhir Desember 2015.
- b. Terhadap penyaluran bansos selain PIP di lingkungan Kemendikbud RI yang karena terkendala oleh akun 52 (belanja barang), Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk tetap menggunakan akun 57 (belanja bansos).

5. Frankfurt Book Fair (FBF).

Komisi X DPR RI menilai bahwa kegiatan *Frankfurt Book Fair* (FBF) yang akan diselenggarakan pada 14-18 Oktober 2015 di Jerman merupakan sebuah kehormatan Indonesia di mata dunia, untuk itu Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbud RI untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut sebaik mungkin dan berkoordinasi dengan K/L lainnya.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 18.50 WIB.

KETUA,



IR. H.M. RIDWAN HISJAM